# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian, meliputi konsep kemiskinan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) beserta hubungannya dengan kemiskinan. Selain itu, bab ini juga menguraikan profil kemiskinan di Papua untuk memberikan konteks empiris terhadap permasalahan yang diteliti.

## 2.1 Landasan Teori

Landasan teori ini menguraikan konsep dasar yang relevan dengan penelitian, yaitu kemiskinan sebagai variabel dependen, serta Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel independen, termasuk keterkaitan teoritis di antaranya.

### 2.1.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Menurut World Bank (2020), kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat mengalami kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Kemiskinan tidak hanya ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, dan kesempatan ekonomi yang memadai.

Menurut Chambers (1983), kemiskinan merupakan suatu konsep yang bersifat terpadu dan memiliki beberapa dimensi, yaitu kemiskinan itu sendiri (*poverty*), ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerentanan terhadap situasi darurat (*vulnerability*), ketergantungan (*dependence*), serta keterasingan baik secara geografis maupun sosial (*isolation*). Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mencerminkan lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.

Arsyad (2010) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sehingga kualitas hidupnya berada di bawah standar yang layak. Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi belum mampu memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas.

Selain dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, serta akses terhadap pelayanan publik. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah umumnya mempunyai keterampilan yang terbatas sehingga sulit memperoleh pekerjaan yang produktif dan berpendapatan tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi rendah dan meningkatkan risiko terjadinya kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam pendekatan ini, penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-makanan yang mencerminkan kebutuhan minimum untuk mempertahankan kehidupan yang layak.

Dalam konteks Provinsi Papua, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan dengan banyak provinsi lainnya di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya akses pendidikan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya kesempatan kerja formal, serta belum meratanya pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, upaya penurunan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan.

### 2.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), APS adalah persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia yang sama. APS digunakan untuk menggambarkan tingkat akses dan pemerataan pendidikan pada suatu wilayah.

Semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin besar kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan, sedangkan semakin rendah nilai APS mengindikasikan masih adanya hambatan dalam mengakses pendidikan, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, maupun geografis.

Badan Pusat Statistik mengelompokkan APS berdasarkan kelompok umur, yaitu 7–12 tahun untuk jenjang Sekolah Dasar (SD/sederajat), 13–15 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP/sederajat), 16–18 tahun untuk Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat), dan 19–24 tahun untuk pendidikan tinggi. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pendidikan pada setiap jenjang usia sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional.

Secara matematis, Angka Partisipasi Sekolah dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{APS} = \left( \frac{\text{Jumlah penduduk usia sekolah yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang sama}} \right) \text{x } 100\%$$

Menurut Nastiti dan Nailufar (2024), APS merupakan indikator yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan. Semakin tinggi APS, maka semakin tinggi pula peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Schultz (1961) dan Becker (1964) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi individu maupun negara. Pendidikan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja sehingga

kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih tinggi juga semakin besar. Dengan demikian, peningkatan APS diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan teori *Human Capital*, peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan peluang memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, Angka Partisipasi Sekolah digunakan sebagai variabel independen yang menggambarkan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Papua selama periode 2017–2021. Data APS diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan diukur dalam satuan persen.

### 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk usia kerja yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingginya nilai TPT menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menyerap tenaga kerja masih rendah sehingga sebagian angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Sebaliknya, rendahnya TPT menunjukkan semakin baik kemampuan perekonomian dalam menyediakan kesempatan kerja.

Berdasarkan konsep Badan Pusat Statistik, penduduk usia kerja adalah seluruh penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja kemudian dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja meliputi penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau tidak melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Pengangguran terbuka meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan (*discouraged workers*), serta penduduk yang telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Secara matematis, Tingkat Pengangguran Terbuka dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \text{ x } 100\%$$

Menurut penelitian Pranizty dan Septiani (2021), Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyerap tenaga kerja. Tingginya TPT mengindikasikan bahwa sebagian besar angkatan kerja belum memperoleh kesempatan bekerja sehingga berpotensi menurunkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa TPT merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pendapat tersebut didukung oleh Todaro dan Smith (2011) yang menjelaskan bahwa tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa perekonomian belum mampu memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Akibatnya, sebagian angkatan kerja kehilangan kesempatan memperoleh

pendapatan sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi menurun. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Tambunan (2011) juga menjelaskan bahwa pengangguran yang berlangsung dalam jangka panjang akan mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan produktivitas tenaga kerja, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, penciptaan kesempatan kerja merupakan salah satu kebijakan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Meskipun demikian, rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa seseorang dikategorikan bekerja apabila melakukan kegiatan ekonomi minimal satu jam dalam seminggu terakhir. Akibatnya, pada daerah yang didominasi sektor informal, banyak penduduk yang secara statistik tidak termasuk pengangguran, tetapi masih memiliki pendapatan yang rendah sehingga tetap berada di bawah garis kemiskinan. Fenomena ini menyebabkan hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat kemiskinan perlu dianalisis secara empiris pada setiap daerah.

### 2.1.4 Hubungan Angka Partisipasi Sekolah dengan Tingkat Kemiskinan

Teori modal manusia yang dikemukakan oleh Schultz (1961) dan Becker (1964) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mempunyai produktivitas yang lebih baik

sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Todaro dan Smith (2016) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan salah satu strategi penting dalam pengentasan kemiskinan. Pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian, semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah maka tingkat kemiskinan cenderung semakin rendah.

### 2.1.5 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan

Pengangguran yang tinggi menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi semakin terbatas. Menurut Todaro dan Smith (2016), pengangguran yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Tambunan (2011) menyatakan bahwa pengangguran mempunyai hubungan positif dengan kemiskinan. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan rendahnya kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Akibatnya, semakin banyak penduduk yang tidak memperoleh pendapatan yang memadai sehingga tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Oleh karena itu, penurunan tingkat pengangguran diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Afifatul Hikma, Sekar Ramadhani, dan Nurizqi Amalia (2019) bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah periode 2008–2017 dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pendidikan, semakin rendah persentase penduduk miskin. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Tasya Putri Indra Pranizty dan Yustirania Septiani (2021) bertujuan untuk menganalisis determinan tingkat kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia periode 2016–2020. Penelitian menggunakan data panel dengan metode regresi data panel melalui pendekatan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Variabel yang digunakan meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), rasio ketergantungan, serta indikator pendidikan berupa APS, APM, dan APK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, APS pada jenjang SMA juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Risa Anin Dita, Astuti Rahayu, dan Sri Suharsih (2022) bertujuan untuk menganalisis determinan keparahan kemiskinan di

enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2010–2020. Penelitian menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Variabel independen yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun, dan kepadatan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap keparahan kemiskinan, sedangkan APS usia 16–18 tahun tidak berpengaruh signifikan terhadap keparahan kemiskinan

Penelitian yang dilakukan oleh Chesar Chandra Khoirul Anam dan Nur Feriyanto (2024) bertujuan untuk menganalisis pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo periode 2008–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan PDRB tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini mendukung teori bahwa peningkatan akses pendidikan mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, dan penelitian terdahulu, yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Angka Partisipasi Sekolah (X1) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di 10 Kabupaten/Kota di Papua tahun 2017-2021.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di 10 Kabupaten/Kota di Papua tahun 2017-2021.
3. Angka Partisipasi Sekolah (X1) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di 10 Kabupaten/Kota di Papua tahun 2017-2021.